

nawaja

Edisi 09, Vol.09

Pemilu : Dalam Bingkai Kejujuran dan Keadilan

Jurnal Integritas:

- Penerapan *Whistleblowing system* pada partai politik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi
- Analisis implementasi keterbukaan informasi publik berbasis *electronic goverment* di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kaupaten Bojonegoro

Koleksi Buku Bulan Ini:

- *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa*
- *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*
- *Pemilukada Asimetris: Sebuah Penerapan Demokrasi Deliberatif di Provinsi Papua*
- *Pengawasan Pemilu Partisipatif*
- *Menuju Peradilan Pemilu*
- *Filsafat Pemilu*

Perpustakaan Gedung Merah Putih KPK
Lt. 1, Jalan Kuningan Persada
Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Perpustakaan Gedung Pusat Pelatihan Antikorupsi KPK
Lt. 4, Jalan Haji R. Rasuna Said
Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

Integritas Pemilu: Jalan Menuju Demokrasi

Resensi Buku "Pemilu: Dalam Bingkai Kejujuran dan Keadilan"

Pemilihan umum (pemilu) adalah pilar utama dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan arah pemerintahan dan masa depan bangsa melalui pemilihan wakil-wakil mereka. Pada demokrasi, pemilu tidak hanya sekadar mekanisme penghitungan suara, tetapi juga cerminan dari kehendak rakyat dan ekspresi kebebasan politik. Proses pemilu yang demokratis tentunya melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, pengawas, media, dan masyarakat sipil. Tolak ukur kesuksesan pemilu dalam demokrasi, tidak hanya diukur dari partisipasi yang tinggi, tetapi juga dari kualitas prosesnya yaitu bagaimana pemilu tersebut dilakukan secara terbuka, adil, dan akuntabel.

"Pemilu: Dalam Bingkai Kejujuran dan Keadilan" adalah sebuah karya yang mendalami perkembangan regulasi dan dinamika pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, mengupas dua pilar utama yang menjadi landasan demokrasi: kejujuran dan keadilan. Ditulis oleh Agusniwan Etra, buku ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai refleksi mendalam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Kemudian, dikupas oleh penulis dengan berbagai aspek penting dari pemilu, mulai dari peran penyelenggara, keterlibatan publik, hingga hukum yang mengatur pelaksanaan pemilu termasuk ketentuan dan pembatasan hak warga negara mantan terpidana dalam mengikuti kontestasi pemilu.

Juga memberikan ulasan yang komprehensif mengenai regulasi yang mengatur pemilu di Indonesia, dengan pendekatan kritis terhadap pelaksanaan undang-undang pemilu. Dalam bagian ini, penulis menelaah bagaimana sistem hukum yang berlaku bisa berperan dalam mendukung atau justru menghambat terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Karena pemilu yang jujur dan adil bukan hanya soal aturan dan prosedur, tetapi tentang bagaimana suara rakyat benar-benar dihargai dan diwakili. Penulis menegaskan



bahwa tanpa kejujuran dan keadilan, demokrasi hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa makna substantif bagi rakyat.

Buku yang dituliskan oleh Agusniwan Etra, mengajak pembaca untuk berpikir kritis tentang bagaimana kita bisa berperan aktif menjaga kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu, serta bagaimana pemilu yang sehat bisa menjadi cerminan sejati dari kehendak rakyat. Melalui pendekatan analitis yang kuat dan refleksi yang mendalam, buku ini bukan hanya bacaan bagi para akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi siapa saja yang peduli pada masa depan demokrasi Indonesia.

Penulis : Agusniwan Etra
Penerbit : PT RajaGrafindo Persada
Tahun Terbit : 2022
Tebal Buku : 380

Vol.9 No.1, Tahun 2023

Penerapan *whistleblowing system* pada partai politik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi

The implementation of whistleblowing in political parties to prevent corruption crimes



Partai politik merupakan elemen demokrasi yang sangat penting. Standar etik, akuntabilitas, dan budaya demokrasi partai perlu menjadi perhatian. Penelitian ini mengkaji penerapan *whistleblowing system* di partai politik dan efektivitasnya dalam mencegah korupsi. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi diolah menjadi deskripsi formatif dan solutif. Sistem yang dirumuskan bernama SIAPP (Sistem Informasi dan Aduan Partai Politik). SIAPP merupakan platform digital yang dimiliki oleh partai politik berisi informasi mengenai skema kerja dan pendidikan antikorupsi, akses interaktif masyarakat, lama aduan. SIAPP dapat menunjang pelaksanaan Modul Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang telah diluncurkan KPK RI. Partai politik perlu membuka diri agar masyarakat mengetahui skema kerja yang anti korupsi; standar etik bagi kader partai; dan budaya demokrasi partai. Hasil penelitian menyebutkan partai politik dan pegiat anti korupsi sepakat dengan mekanisme SIAPP yang ditawarkan karena dirasa cukup efektif dalam mencegah korupsi politik dan mendorong keterbukaan partai sehingga mendapat kepercayaan publik.

Analisis implementasi keterbukaan informasi publik berbasis *electronic government* di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro

An analysis of the implementation of the e-government based public information disclosure in Kedungsumber Village, Temayang District, Bojonegoro Regency



Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu desa di Jawa Timur yang sudah menerapkan keterbukaan informasi publik berbasis elektronik, dan menjadi 10 besar dalam lomba desa dengan keterbukaan publik tingkat nasional adalah Desa Kedungsumber. Mengingat hal tersebut sehingga pemerintahan desa dapat diselenggarakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Analisis data yang digunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berbasis E-Government di Desa Kedungsumber sudah terlaksana, namun terdapat beberapa kekurangan yaitu tugas masih terbebankan besar di sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), belum adanya SOP terkait publikasi KIP, susah sinyal di desa menjadi kendala dalam komunikasi, belum ada untuk peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di PPID, dan proses mitigasi risiko E-Government masih sangat minim. Sedangkan untuk Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat sudah disediakan dan dipublikasikan, namun PPID Desa Kedungsumber dalam proses KIP belum melakukan pengujian konsekuensi, dan tingkatan penerapan E-Government Desa Kedungsumber adalah Enhanced (perlu ditingkatkan).

Koleksi Bulan Ini!



Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa

Sebuah karya yang berangkat dari pengalaman empiris, merupakan percik intelektual penulis tentang pengawas pemilu dalam pusaran demokrasi.

01



Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Menguraikan mengenai teknis penyelesaian pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

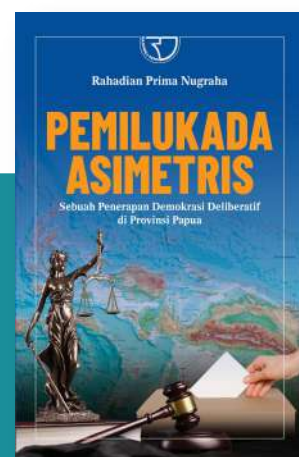
02



Pemilukada Asimetris: Sebuah Penerapan Demokrasi Deliberatif di Provinsi Papua

Membahas mengenai konstitusionalitas penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang bersifat asimetris di Indonesia.

03





04



Pengawasan Pemilu Partisipatif

Menyajikan pemikiran mengenai pemilu partisipatif sebagai bagian dari merawat ingatan publik tentang Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia.

05



Menuju Peradilan Pemilu

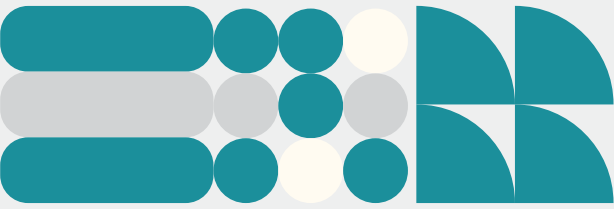
Membahas mengenai sejarah kelembagaan Bawaslu yang mengalami pasang surut di tengah pusaran sistem Pemilu di Indonesia. Juga menjabarkan model-model Badan Peradilan Khusus Pemilu yang dapat dipilih oleh Indonesia.

06



Filsafat Pemilu

Mengangkat isu penyelenggaraan pemilu dari sudut pandang filsafat keadilan bermataabab.



nawaja

Edisi 08, Vol.09

Yuk Berkunjung ke Perpustakaan KPK
Scan untuk informasi lebih lanjut

